

Judul : Revisi UU No 1 Tahun 1987, komisi VI akan pertegas peran Kadin dalam perekonomian
Tanggal : Rabu, 09 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU No 1 Tahun 1987

Komisi VI Akan Pertegas Peran Kadin Dalam Perekonomian

SENAYAN tengah menggarap revisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan mengusulkan memasukkan klausul tentang fungsi dan peran Kadin dalam perekonomian nasional.

Anggota Komisi VI DPR Doni Akbar mengatakan, Kadin perlu ditempatkan secara proporsional sebagai representasi dunia usaha yang mampu memberikan masukan, rekomendasi, pertimbangan hingga evaluasi kebijakan di bidang perekonomian kepada Pemerintah. Utamanya dalam perumusan kebijakan nasional di bidang perdagangan, industri, investasi, dan jasa.

"Kadin nantinya mampu menjadi jembatan yang efektif antara kepentingan dunia usaha dengan Pemerintah dan bukan sekadar menjadi organisasi administratif," ujar Doni di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Namun, Doni mengingatkan, fungsi dan peran Kadin yang berpotensi berbenturan dengan fungsi Pemerintah dalam penyusunan dan penetapan kebijakan nasional perlu didalami se-

cara komprehensif. Karena itu, perlu penguatan fungsi lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha, dunia usaha, penyedia data dan informasi, fasilitasi serta dukungan terhadap keberlanjutan usaha.

Terkait rencana pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis, Doni berpandangan, hal itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam. Jangan sampai pembentukan lembaga baru tersebut justru menambah panjang rantai kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Kadin, beber dia, sesungguhnya telah memiliki berbagai lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang menangani persoalan dunia usaha dan perlindungan konsumen. Yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan mekanisme arbitrase penyelesaian sengketa yang telah memiliki dasar hukum.

Karena itu, pilihan kebijakan yang lebih tepat adalah mem-



Doni Akbar

perkuat kewenangan, kapasitas, koordinasi, dan efektivitas lembaga yang sudah ada, daripada terus menambah lembaga baru. Bila persoalannya adalah lemahnya efektivitas penyelesaian sengketa, saran Doni, maka yang perlu diperbaiki adalah mekanisme dan kapasitas penyelesaian sengketa.

Untuk itu, Doni mendorong revisi beleid tersebut diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata dunia usaha. Seperti memberikan kepastian hukum, kemudahan berusaha, akses informasi dan data, fasilitasi investasi,

penyelesaian hambatan usaha, serta perlindungan terhadap keberlanjutan usaha, khususnya UMKM.

"Penguatan kelembagaan bukan berarti memperbesar kewenangan, tapi memperjelas fungsi, memperkuat kapasitas, dan memastikan Kadin benar-benar hadir sebagai mitra strategis Pemerintah sekaligus representasi dunia usaha," tandas legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto menambahkan, revisi UU Kadin menjadi momentum penting untuk memperkuat peran lembaga tersebut sebagai wadah dunia usaha sekaligus mitra strategis Pemerintah. Ini demi mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Adisatrya menilai, beleid yang telah berusia hampir empat dekade ini perlu diperbarui karena kondisi perekonomian telah mengalami perubahan fundamental. Seperti globalisasi, digitalisasi, perkembangan teknologi, termasuk artificial

intelligence (AI), serta semakin terintegrasinya pasar nasional dengan rantai pasok global.

Untuk itu, kata Adisatrya, revisi beleid tersebut sangat dibutuhkan untuk memperkuat peran Kadin dalam meningkatkan daya saing dunia usaha Indonesia. "Kadin perlu menjadi mitra strategis Pemerintah dalam memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang selaras dengan kebutuhan nyata dunia usaha," kata politisi PDIP ini.

Karena itu, ia berharap revisi aturan tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya memperbarui ketentuan yang sudah tidak relevan. Tapi, menjadi momentum untuk membangun Kadin yang lebih kuat, profesional, inklusif, transparan, dan adaptif terhadap perubahan.

"Kadin juga mampu menjadi rumah besar bagi dunia usaha Indonesia dan dapat menemukan kepentingan pelaku usaha besar dengan UMKM, sekaligus menghubungkan potensi ekonomi daerah dan nasional," tutup legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini. ■ TIF